

8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI



TUJUAN 8

MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan <i>the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production</i> , dengan negara-negara maju sebagai pengarah.	8.4.1	Jejak material (<i>material footprint</i>) yang dihitung selama tahun berjalan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	8.4.2	Konsumsi material domestik (<i>domestic material consumption</i>).	Indikator global yang akan dikembangkan.
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan	8.7.1	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.			
8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.	8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	8.8.2	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.	Indikator global yang akan dikembangkan.
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
			(tidak ada di dalam lampiran perpres).
	8.10.2	Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (18 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak.	Indikator global yang akan dikembangkan.
8.a Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui <i>the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance</i> bagi negara kurang berkembang.	8.a.1	Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
8.b Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan <i>the Global Jobs Pact of the International Labour Organization</i> .	8.b.1	Total pengeluaran pemerintah dalam program perlindungan sosial dan ketenagakerjaan dalam proporsi terhadap anggaran nasional dan PDB.	Indikator global yang akan dikembangkan.

8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI



TUJUAN 8

MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA

TARGET 8.1

Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang

INDIKATOR 8.1.1*

Laju pertumbuhan PDB per kapita

KONSEP DAN DEFINISI

PDB per kapita (Ribu Rp.) menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nominal PDB dan jumlah penduduk. PDB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDB atas harga dasar berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Laju pertumbuhan PDB per kapita merupakan pertumbuhan PDB per kapita dari periode t-1 ke periode t.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Laju pertumbuhan PDB per kapita diperoleh dengan mengurangi nilai PDB per kapita pada periode ke - t terhadap nilai pada periode ke t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada periode ke t-1, dikalikan dengan 100 persen. PDB yang digunakan yaitu **PDB Per kapita dengan harga konstan**.

Rumus:

$$\text{Laju PDBpk} = \left(\frac{\text{PDBpk}_t - \text{PDBpk}_{t-1}}{\text{PDBpk}_{t-1}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

PDBpk : PDB per kapita

PDBpk_t : PDB per kapita pada periode ke t

PDBpk_{t-1}: PDB per kapita pada periode ke t-1

MANFAAT

Mengukur perubahan pendapatan di dalam masyarakat.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Publikasi PDB Triwulanan dan Pendapatan Nasional Indonesia sesuai tahun berjalan

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

1. Semester (nasional dan provinsi); atau
2. Tahunan (kabupaten/kota).

INDIKATOR 8.1.1.(a)

PDB per kapita

KONSEP DAN DEFINISI

PDB per kapita (Ribu Rp.) menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nominal PDB dan jumlah penduduk. PDB per kapita di peroleh dengan cara membagi PDB atas harga dasar berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

PDB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) diperoleh dengan cara membagi PDB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk.

Rumus:

$$PDB_{pk} = \frac{PDB \text{ ADHB}}{JP}$$

Keterangan:

PDB_{pk} : PDB per kapita
PDB ADHB : PDB atas dasar harga berlaku
JP : Jumlah Penduduk

MANFAAT

Menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan oleh satu orang penduduk selama satu tahun.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Publikasi PDB Triwulanan dan Pendapatan Nasional Indonesia sesuai tahun berjalan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

1. Semester (nasional dan provinsi); atau
2. Tahunan (kabupaten/kota).

TARGET 8.2

Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk fokus pada peningkatan nilai tambah tinggi dan sektor padat karya

INDIKATOR 8.2.1*

Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun

KONSEP DAN DEFINISI

Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (r) adalah rata-rata laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDB yang dipergunakan adalah **PDB atas dasar harga konstan**, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja diperoleh dengan mengurangi nilai PDB per tenaga kerja pada periode ke-t terhadap nilai PDB per tenaga kerja pada periode ke t-1, dibagi dengan nilai PDB per tenaga kerja pada periode ke t-1, dikalikan dengan 100 persen.

Rumus:

$$LP\ PDB\ ptk = \left(\frac{PDB\ ptk_t - PDB\ ptk_{t-1}}{PDB\ ptk_{t-1}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

LP PDB ptk : Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja
PDB ptk_t : PDB per tenaga kerja pada periode t
PDB ptk_{t-1} : PDB per tenaga kerja pada periode t-1

MANFAAT

Memonitor tingkat produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik:

1. Publikasi PDB Triwulanan dan Pendapatan Nasional Indonesia sesuai tahun berjalan; dan
2. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

DRAFT

TARGET 8.3

Mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses pada layanan keuangan

INDIKATOR 8.3.1*

Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin

KONSEP DAN DEFINISI

Pekerja informal di sektor non-pertanian adalah penduduk yang bekerja di sektor non-pertanian dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga, pekerja bebas.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Proporsi pekerja informal di sektor non-pertanian dapat di peroleh dengan membagi jumlah penduduk yang bekerja informal di sektor non-pertanian, dengan jumlah keseluruhan penduduk bekerja di sektor non-pertanian dikali 100 persen.

Rumus:

$$P_{LPINP} = \frac{PINP}{PTINP} \times 100\%$$

Keterangan:

- P LPINP** : Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian
PINP : Jumlah Penduduk yang bekerja informal di sektor non-pertanian
PTINP : Jumlah keseluruhan penduduk bekerja di sektor non-pertanian

MANFAAT

Mendorong kebijakan yang berorientasi pembangunan yang mendukung aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja yang baik, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan/permodalan. Semakin menurunnya indikator ini menunjukkan bahwa terjadi pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah yang mampu menampung dan menyediakan lapangan kerja yang lebih terlindungi (*secure*).

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: provinsi;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan;
3. Kelompok umur;
4. Tingkat pendidikan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 8.3.1.(a)

Persentase tenaga kerja formal

KONSEP DAN DEFINISI

Tenaga kerja formal merupakan penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan utama sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan buruh/karyawan/pegawai.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Persentase tenaga kerja formal dapat diperoleh dengan membagi jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal dengan penduduk yang bekerja dikalikan dengan 100 persen.

Rumus:

$$P\ TKF = \frac{JTKF}{JTK} \times 100\%$$

Keterangan:

P TKF : Persentase tenaga kerja formal
JTKF : Jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal
JTK : Jumlah penduduk yang bekerja

MANFAAT

Mendorong kebijakan yang berorientasi pembangunan yang mendukung aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja yang baik, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan/permodalan pada sektor non-pertanian.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: provinsi;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan;
3. Jenis kelamin.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 8.3.1.(b)

Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian

KONSEP DAN DEFINISI

Pekerja informal di sektor pertanian adalah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga, pekerja bebas.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian dapat diperoleh dengan membagi jumlah tenaga kerja informal sektor pertanian dengan penduduk yang bekerja dikali 100 persen.

Rumus:

$$P \text{ TKINP} = \frac{JTKINP}{JTK} \times 100\%$$

Keterangan:

P TKINP : Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian
JTKINP : Jumlah penduduk yang bekerja di sektor informal pertanian
JTK : Jumlah penduduk yang bekerja

MANFAAT

Melihat proporsi penduduk yang memiliki pekerjaan pada kegiatan informal di sektor pertanian sebagai proksi proporsi pekerja yang tidak memiliki kondisi kerja yang terlindungi (*secure*).

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: provinsi;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan;
3. Jenis kelamin.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 8.3.1.(c)

Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan

KONSEP DAN DEFINISI

Layanan Keuangan merupakan bentuk layanan dari lembaga bank maupun bukan bank yang menyalurkannya pembiayaan baik berupa pinjaman maupun penyertaan modal.

UMKM didefinisikan sebagai:

1. **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. **Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Persentase akses layanan keuangan formal UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) diperoleh dengan jumlah rekening kredit UMKM dibagi dengan jumlah total UMKM dikalikan dengan 100 persen.

Rumus:

$$P \text{ LKUMKM} = \frac{RUMKM}{UMKM} \times 100\%$$

Keterangan:

P LKUMKM : Persentase akses layanan keuangan formal UMKM
RUMKM : Jumlah rekening kredit UMKM
UMKM : Jumlah total UMKM

MANFAAT

Mengidentifikasi berapa banyak UMKM yang sudah mendapatkan akses terhadap layanan keuangan formal.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Bank Indonesia;
2. Otoritas Jasa Keuangan;
3. Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

DISAGREGASI

Wilaya administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 8.5

Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

INDIKATOR 8.5.1*

Upah rata-rata per jam kerja

KONSEP DAN DEFINISI

Upah/gaji bersih adalah imbalan yang diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan baik berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan. Imbalan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Upah/ gaji bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan dan sebagainya.

Upah rata-rata per jam kerja merupakan imbalan atau penghasilan rata-rata yang diperoleh tiap jam baik berupa uang maupun barang.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Upah rata-rata per jam kerja diperoleh dengan cara membagi upah baik uang maupun barang yang diperoleh dalam sebulan dengan jumlah jam kerja aktual seminggu dikalikan dengan 4 (empat).

Rumus:

$$\bar{W} = \frac{W}{H \times 4}$$

Keterangan:

\bar{W} : Upah rata-rata per jam kerja

W : Upah baik uang maupun barang yang diperoleh dalam sebulan

H : Jumlah jam kerja aktual seminggu

MANFAAT

Menggambarkan kesetaraan upah bagi pekerjaan yang mempunyai nilai yang sama guna mendukung pencapaian ketenagakerjaan secara penuh dan produktif dan pekerjaan yang baik bagi seluruh perempuan dan laki-laki.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: provinsi;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan;
3. Jenis kelamin;
4. Kelompok umur;
5. Tingkat pendidikan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 8.5.2*

Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur

KONSEP DAN DEFINISI

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Konsep pengangguran yaitu (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Tingkat pengangguran terbuka diperoleh dengan cara membagi penduduk yang termasuk dalam kategori pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dikali dengan 100 persen.

Rumus:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Keterangan:

TPT: Tingkat pengangguran terbuka

MANFAAT

Melihat pencapaian ketenagakerjaan bagi seluruh perempuan dan laki-laki, termasuk untuk kaum muda dan orang dengan disabilitas.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik:

1. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas);
2. Sensus Penduduk.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: provinsi;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan;
3. Jenis kelamin;
4. Kelompok umur;

5. Tingkat pendidikan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

DRAFT

INDIKATOR 8.5.2.(a)

Tingkat setengah pengangguran

KONSEP DAN DEFINISI

Pekerja setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Tingkat setengah pengangguran diperoleh dari pembagian penduduk yang termasuk dalam kategori setengah pengangguran dan penduduk yang bekerja dikali 100 persen.

Rumus:

$$\text{Tingkat Setengah Pengangguran} = \frac{A}{TK} \times 100\%$$

Keterangan:

- A : Jumlah pekerja yang bekerja kurang dari jam kerja normal
TK : Jumlah penduduk yang bekerja

MANFAAT

Mengetahui proporsi penduduk yang setengah pengangguran sebagai proksi tenaga kerja yang belum memiliki produktivitas optimal. Hal ini dapat menjadi acuan pemerintah dalam rangka meningkatkan tingkat utilisasi dan produktivitas pekerja.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik:

1. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas);
2. Sensus Penduduk.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan;
3. Jenis kelamin;
4. Kelompok umur;
5. Tingkat pendidikan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

DRAFT

TARGET 8.6

Pada tahun 2020, mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja dan tidak dalam pelatihan dan tidak sekolah

INDIKATOR 8.6.1*

Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET)

KONSEP DAN DEFINISI

Kategori usia muda merupakan laki-laki dan perempuan yang berusia 15 – 24 tahun.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET) diperoleh dengan cara membagi jumlah akumulasi usia muda yang berstatus tidak sekolah, tidak bekerja, tidak mengikuti training atau pelatihan dengan jumlah penduduk usia muda (15-24 tahun) dikali dengan 100 persen.

Rumus:

$$NEET = \frac{T(S, B, T)}{\text{Jumlah penduduk usia 15 – 24 tahun}} \times 100\%$$

Keterangan :

NEET : *Not in Employment and Not in Education or Training* (tidak sekolah, tidak bekerja, tidak mengikuti training atau pelatihan)

TS : Tidak Sekolah

TB : Tidak Bekerja

TT : Tidak mengikuti Training/Pelatihan

MANFAAT

Mengukur presentase penduduk usia muda yang tidak bersekolah, bekerja dan mengikuti pelatihan, sebagai proksi keterbatasan akses dalam memperoleh pendidikan, pelatihan serta pekerjaan pada usia muda.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: provinsi, kabupaten dan kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

DRAFT

TARGET 8.8

Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.

INDIKATOR 8.8.1.(a)

Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3

KONSEP DAN DEFINISI

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.

Rumus: -

MANFAAT

Mengetahui dan memonitor bentuk tindakan yang dilakukan guna melindungi dan memperhatikan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan orang lain yang berada di dalam lingkungan tempat kerja dari potensi bahaya.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 8.9

Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.

INDIKATOR 8.9.1*

Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB

KONSEP DAN DEFINISI

Kontribusi pariwisata terhadap PDB didefinisikan sebagai:

- Dari sisi produksi merupakan persentase rasio nilai tambah sektor-sektor terkait pariwisata terhadap total PDB (harga berlaku);
- Dari sisi pengeluaran merupakan persentase rasio penjumlahan pengeluaran ekonomi untuk pariwisata terhadap total PDB (harga berlaku).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB diperoleh dari pembagian penjumlahan pengeluaran ekonomi untuk pariwisata terdiri dari dari konsumsi wisatawan nusantara, pengeluaran pemerintah untuk pariwisata, investasi pariwisata dan ekspor *netto* jasa perjalanan (ekspor jasa perjalanan dikurangi impor jasa perjalanan) dengan PDB pada harga berlaku dikalikan dengan 100 persen.

Rumus:

$$\text{TDGDP} = \frac{(C_{\text{winus}} + E_{\text{wisnas}} + E_{\text{pemerintah}} + I_{\text{pariwisata}} + NX_{\text{perjalanan}})}{\text{PDB}} \times 100\%$$

Keterangan:

TDGDP	: Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB
C_{winus}	: Konsumsi wisatawan nusantara
E_{wisnas}	: Pengeluaran wisatawan nasional di domestik (termasuk <i>pre</i> dan <i>post trip</i>)
$E_{\text{pemerintah}}$: Pengeluaran pemerintah untuk pariwisata
$I_{\text{pariwisata}}$: Investasi pariwisata
$NX_{\text{perjalanan}}$: Ekspor <i>netto</i> jasa perjalanan (ekspor jasa perjalanan dikurangi impor jasa perjalanan)

MANFAAT

Mengetahui kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan negara.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Badan Pusat Statistik;
2. Kementerian Pariwisata.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

DRAFT

INDIKATOR 8.9.1.(a)

Jumlah wisatawan
mancanegara

KONSEP DAN DEFINISI

Jumlah wisatawan mancanegara adalah banyaknya jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia.

Rumus: -

MANFAAT

Mengukur penerimaan negara yang diperoleh dari sektor pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Badan Pusat Statistik;
2. Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi (berdasarkan pintu kedatangan);
2. Negara asal;
3. Pintu kedatangan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 8.9.1.(b)

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara

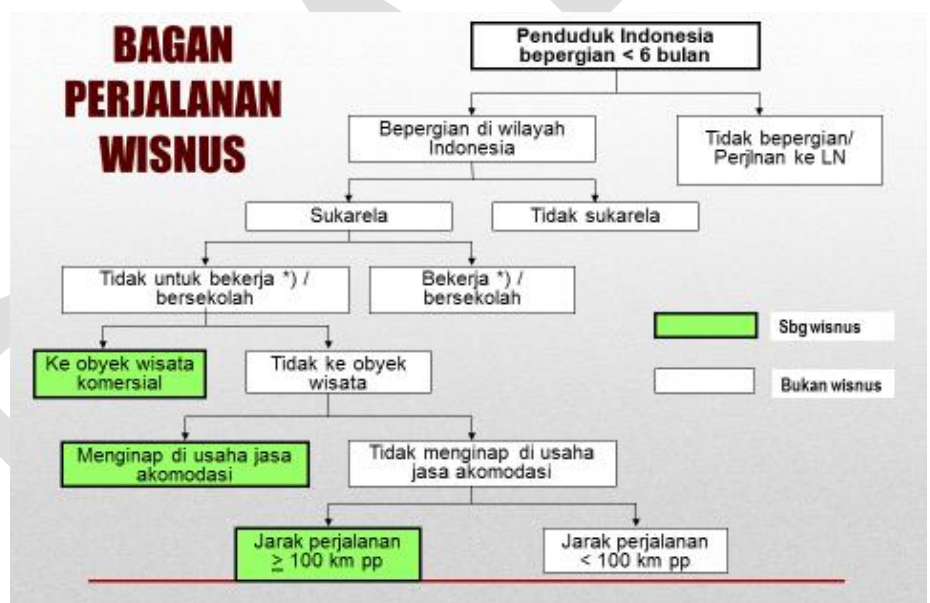
KONSEP DAN DEFINISI

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara adalah jumlah perjalanan kurang dari 6 bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk bekerja atau sekolah.

METODE PERHITUNGAN

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dihitung berdasarkan salah satu kriteria:

- Penduduk yang melakukan perjalanan mengunjungi obyek wisata komersial;
- Penduduk yang melakukan perjalanan tidak mengunjungi obyek wisata komersial namun menginap di usaha jasa akomodasi;
- Penduduk yang melakukan perjalanan tidak mengunjungi obyek wisata komersial maupun tidak menginap di usaha jasa akomodasi tetapi menempuh perjalanan di atas 100 km (pulang-pergi).



MANFAAT

Indikator ini digunakan untuk mengetahui preferensi wisatawan domestik terhadap objek wisata domestik sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata Indonesia.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

DRAFT

INDIKATOR 8.9.1.(c)

Jumlah devisa sektor pariwisata

KONSEP DAN DEFINISI

Jumlah devisa sektor pariwisata adalah penerimaan negara dari sektor pariwisata yang berasal dari kunjungan wisatawan mancanegara.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah devisa sektor pariwisata dalam Juta USD

Rumus: -

MANFAAT

Mengukur penerimaan negara yang diperoleh dari sektor pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk penciptaan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi daerah.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Pariwisata: Survei Wisatawan Mancanegara dan *Passenger Exit Survey*;
2. Badan Pusat Statistik: Catatan administrasi imigrasi.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 8.9.2*

Jumlah pekerja pada sektor pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja

KONSEP DAN DEFINISI

Sektor Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah pekerja pada sektor pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja, indikator ini dapat diperoleh dengan cara membagi jumlah pekerja pada industri pariwisata, dengan jumlah pekerja semua sektor dikalikan dengan 100 persen.

Rumus:

$$P \text{ TKSP} = \frac{\text{TKSP}}{\text{TK}} \times 100\%$$

Keterangan:

P TKSP : Proporsi jumlah pekerja pada sektor pariwisata
TKSP : Jumlah pekerja pada sektor pariwisata
TK : Jumlah pekerja

MANFAAT

Indikator ini digunakan agar industri pariwisata terus berkembang, perkembangan ini perlu didukung oleh peningkatan sumber daya pada industri pariwisata. Industri pariwisata perlu dirancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung turisme yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus mendukung budaya dan produk lokal.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Badan Pusat Statistik;
2. Kementerian Pariwisata.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 8.10

Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.

INDIKATOR 8.10.1*

Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa

KONSEP DAN DEFINISI

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah mesin dengan sistem komputer yang diaktifkan dengan menggunakan kartu magnetik bank yang berkode atau bersandi. Melalui mesin tersebut nasabah dapat menabung, mengambil uang tunai, mentransfer dana antar-rekening, dan transaksi rutin lainnya. Jumlah ATM dalam perhitungan ini adalah ATM yang tercatat sebagai aset bank dan ATM yang dikelola dan menjadi tanggung jawab bank pelapor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Bank Umum dan ketentuan Bank Indonesia mengenai Bank Umum Syariah.

Kantor Bank adalah sebagai seluruh jaringan/unit kantor bank yang tercatat dapat memberikan layanan keuangan kepada nasabah (melakukan kegiatan operasional) dan terpisah secara fisik dengan kantor utamanya, antara lain meliputi: Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Kas, Unit Usaha Syariah, Kas Mobil, *Payment Point*, *Agency*, dan *Deposit Taking Company* (DTC). Jaringan kantor adalah Jaringan Kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Bank Umum dan ketentuan Bank Indonesia mengenai Bank Umum Syariah.

Penduduk Dewasa adalah semua penduduk di suatu negara atau provinsi atau kabupaten/kota yang berusia 15 tahun atau lebih.

METODE PERHITUNGAN

1. Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa

Cara perhitungan:

Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa diperoleh dengan cara membagi jaringan kantor dengan jumlah orang dewasa dikalikan 100.000.

Rumus:

$$\text{JKB per 100.000} = \frac{(\text{Jaringan kantor})}{\text{Jumlah Penduduk Dewasa}} \times 100.000$$

Keterangan:

JKB : Jumlah kantor bank

2. Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa**Cara perhitungan:**

Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa diperoleh dengan cara membagi jumlah ATM dikalikan dengan 100.000 dibagi dengan jumlah orang dewasa

Rumus:

$$J_{ATM} = \frac{(\text{Jumlah ATM} \times 100.000)}{\text{Jumlah Penduduk Dewasa}}$$

Keterangan:

J_{ATM}: Jumlah ATM

MANFAAT

Melihat keterjangkauan masyarakat terhadap fasilitas lembaga keuangan perbankan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBPU)): Data Jumlah Kantor dan ATM.
2. Badan Pusat Statistik : Data Penduduk Dewasa.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 8.10.1.(a)

Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)

KONSEP DAN DEFINISI

Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum) merupakan rata-rata jarak lembaga keuangan (bank umum) dari kantor desa.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Rata-rata jarak lembaga keuangan dihitung dalam kilometer (km) dari kantor desa.

Rumus: -

MANFAAT

Mengukur aksesibilitas penduduk terhadap layanan keuangan formal.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Statistik Potensi Desa (Podes).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tiga (3) tahunan.

INDIKATOR 8.10.1.(b)

Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit

KONSEP DAN DEFINISI

Kredit UMKM merupakan semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pelapor dengan bank dan pihak ketiga bukan bank yang memenuhi kriteria usaha sesuai undang-undang tentang UMKM yang berlaku.

Kredit dengan penjaminan tertentu merupakan bagian dari kredit UMKM.

Kredit Dengan Penjaminan Tertentu adalah kredit/pembiayaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan debitur yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin dengan kriteria tertentu, sebagaimana Program Pemerintah mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit diperoleh dengan membagi jumlah kredit UMKM dengan total kredit dikali dengan 100 persen.

Rumus:

1. $TKUMKM = \frac{\text{Jumlah kredit UMKM}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$
2. **Info tambahan terkait realisasi penyaluran KUR (dari kredit UMKM)**

Keterangan:

TKUMKM : Proporsi kredit UMKM terhadap Total Kredit

MANFAAT

Proksi keterjangkauan UMKM terhadap akses pembiayaan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Bank Indonesia;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Bulanan.

DRAFT